JRUP
Volume 4 Issue 1, Oct 2023: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/index.php/pajak

MEKANISME PEMOTONGAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 21 GAJI KARYAWAN TETAP PADA CV SURYA TEKNIK GEMILANG

Ayu Tri Astanti
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : 2000312320051@ulm.ac.id

Norlena
Email : norlena@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Lili Safrida
Email : lilisafrida@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

Article 21 Income Tax is a mandatory expense that must be paid to every citizen related to the work carried out by that citizen. This observation aims to investigate and find out the mechanisms and obstacles to withholding and calculating income tax at CV Surya Teknik Gemilang and to obtain appropriate solutions to problems found internally regarding the process of calculating, withholding and reporting income tax based on Article 21. Quantitative techniques are used in the research This and the type of data used is secondary data. The information gathering technique used is processing from question and answer activities with employees. Research at CV Surya Teknik Gemilang Banjarmasin, specifically withholding and calculating personal income tax Article 21, still found errors in calculating and withholding PTKP tax rates for employees without NPWP. If the difference between the total underpaid tax and the total tax reported is less than the total tax that must be paid due to an error in calculating PPh Article 21.

Keywords: Income Tax Article 21, Income Tax Structure Article 21, Calculation, Withholding, Reporting

ABSTRAK

Pasal 21 PPh adalah pengeluaran wajib yang harus dibayarkan kepada setiap warga negara yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh warga negara tersebut. Observasi ini bertujuan buat menyelidiki dan mengetahui mekanisme dan hambatan pemotongan serta penghitungan pajak penghasilan di CV Surya Teknik Gemilang dan untuk mendapatkan solusi yang sesuai untuk permasalahn yang ditemukan secara internal mengenai proses penghitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21. Teknik kuantitatif digunakan pada penelitian ini dan jenis data yang dipergunakan ialah data sekunder. Teknik menghimpun informasi yang dipergunakan berupa pengolahaan dari kegiatan tanyajawab dengan karyawan. Penelitian di CV Surya Teknik Gemilang

Banjarmasin, khususnya pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 21 pribadi, masih ditemukan kesalahan penghitungan dan pemotongan tarif pajak PTKP bagi karyawan tanpa NPWP. Apabila selisih antara total pajak yang kurang dibayar dengan total pajak yang dilaporkan lebih dikit dari total pajak yang wajib dilunasi sebab kesalahan penghitungan PPh Pasal 21.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Struktur PPh Pasal 21, Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan

PENDAHULUAN

Pajak artinya sokongan yang wajib dilakukan dan harus dibayarkan terhadap objek kena pajak yang pendapatannya harus diberikan pada pihak yang berwenang. Karena departemen pajak mewakili salah satu atau sebagian besar sumber pendapatan negara yang paling penting, ada upaya konstan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dari departemen pajak. Pungutan ialah salah satu sumbernya pemasukan keuangan pemerintah terbanyak bagi perekonomian suatu negara dan dipergunakan oleh individu atau bisnis untuk kepentingan pemerintah dan publik.

Komponen pada ragam pajak penghasilan ini sama dengan PPh Pasal 21 atau umumnya disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemasukan akan diperoleh dalam bentuk pendapatan, imbalan, pungutan, sumbangan maupun sokongan, tanpa memandang identitas atau dalam wujud, yang berkaitan dengan aktivitas, posisi, kontribusi atau tindakan yang dilaksanakan oleh WP OP dalam negeri.

Pemungutan oleh pemerintah dilakukan dengan memperkenalkan tiga sistem: sistem perpajakan resmi, sistem perpajakan sukarela, dan sistem pemotongan. Pemerintah mengamanatkan sistem self-assessment ketika menerapkan perhitungan pajak penghasilan. Artinya pemerintah mempercayakan pada wajib pajak guna menghitung, dan menyelesaikan sendiri seluruh kewajibannya serta melaporkan tunggakan pajaknya.

Umumnya, ada tiga cara pemotongan gaji pegawai PPh 21: gaji bersih atau gaji bersih termasuk pajak perusahaan. Cara ini berlaku bagi karyawan atau pencari nafkah yang menerima gaji bersih yang beban pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Gross-up Act berlaku untuk karyawan atau pencari nafkah yang berhak atas tunjangan pajak yang setara dengan jumlah pajak yang dipotong. Yang saya maksud adalah gaji pokok ditambah tunjangan pajak, dibayarkan kemudian oleh perusahaan tanpa ada pengurangan gaji pokok. Sedangkan metode total berlaku bagi pegawai atau pencari nafkah yang memiliki kewajiban pembayaran sendiri

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 PPh. Artinya, total gaji pegawai tidak dipotong PPh Pasal 21.

Sistem ini memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa mereka akan dapat menghitung pajak mereka sendiri untuk tahun pajak tersebut. Penghitungan pajak penghasilan (PPh) pribadi yang terutang dilaksanakan bagi wajib pajak sendiri berarti Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan UU perpajakan.

Berdasarkan Pasal 20(1) PER-16/PJ/2016, pemotongan pajak PPh Pasal 21 bagi penerima imbalan tanpa NPWP akan dinaikkan menjadi 20% dari tarif pajak bagi wajib pajak yang telah mendapat NPWP. Sebab itu, menurut Pasal 20(2) PER-16/PJ/2016, Pasal 21 PPh mengatur perihal NPWP akan mesti dipotong sebanyak 120% dari total PPh Pasal 21 yang bersangkutan.

Tarif PPh 21 terbaru tahun 2022 sudah berlaku. Dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau biasa dikenal dengan UU HPP, pemerintah telah melaksanakan pergantian yang relevan terkait dengan pengaturan perpajakan. Pergantian yang paling dominan dalam undang-undang perpajakan ialah tarif pajak pribadi, yang lebih dahulu diatur oleh Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU PPH).

Diketahui, dengan adanya revisi tarif PPh 21 2022 baru-baru ini, sebelumnya hanya ada 4 tingkatan, kini menjadi 5 tingkatan. Pemerintah akan menambah tier final sebesar 35% jika penghasilan wajib pajak melebihi Rp5 miliar. Selanjutnya pada shift pertama diberlakukan tarif pajak 5% menjadi Rp.0 - Rp50.000.000,00 per tahun, namun sekarang telah diubah dengan tarif pajak yang sama dari Rp.0 menjadi Rp.60.000.000,00 per tahun yaitu 5%.

Tarif PPh 21 tahun 2022 yang terbaru terhadap PKP diberlakukan dari 0 rupiah sampai dengan 60 juta rupiah dikenakan 5%, lalu 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta dikenakan 15%, lalu 250 juta rupiah - 500 juta rupiah dikenakan 25%, 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah dikenakan 30%, lalu diatas 5M dikenakan 35%.

(PPh) pasal 21 memang sudah berlaku cukup baik di CV Surya Teknik Gemilang, tetapi masih terdapat kesalahan perhitungan dan pemotongan untuk satu orang yang belum memiliki NPWP, sehingga mengakibatkan kurang bayar dan kurang setor.

HASIL PENELITIAN

2.1 Pemotong Pajak Penghasilan 21 Gaji Karyawan Tetap pada CV Surya Teknik Gemilang Banjarmasin

Sistem Pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan di CV Surya Teknik Gemilang Banjarmasin memakai With Holding System. With holding system sama dengan cara pemungutannya yang memungkinkan orang 3 buat memutuskan jumlah pajak yang mesti dibayar oleh wajib pajak.

Pemberi kerja merupakan pihak yang dapat memotong PPh Pasal 21, CV Surya Teknik Gemilang Banjarmasin. Jumlah penggantian tergantung pada jumlah pendapatan yang diterima masing-masing karyawan. Pasal 21 Pemotongan pajak dibayar setiap bulan dengan pembayaran gaji bulanan karyawan CV Teknik Surya Gemilang Banjarmasin.

2.2 Penghasilan Gaji Karyawan CV Surya Teknik Gemilang Banjarmasin

Penghasilan yang diterima pegawai CV Surya Teknik Gemilang bhineka sebab adanya disparitas masa kerja tersebut.

Tabel 2.1

Daftar Gaji Karyawan pada CV Surya Teknik Gemilang Januari 2022

No	Nama	Jabatan	Status	Gaji Pokok
1	Apik Iskandar	Manager	K/3	Rp8.000.000
2	Ahmad Faysal	Marketing	K/1	Rp7.000.000
3	Mira Erliana	Accounting	TK/0	Rp6.550.000
4	Syamsul Arifin	Logistik/Transport	K/1	Rp6.400.000
5	Hadriani	Transport/Gudang	K/0	Rp5.500.000
6	Heru Wardana	Transport/Gudang	K/2	Rp5.500.000
7	Rina Nur Astuti	Administrasi	TK/0	Rp3.500.000

Sumber: CV Surya Teknik Gemilang (data diolah kembali oleh peneliti)

Tabel diatas menunjukan beberapa gaji pegawai pada CV Surya Teknik Gemilang, Biaya yang dibayarkan kepada karyawan memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan masing-masing karyawan. Pendapatan yang diperoleh tentunya berdampak pada pajak penghasilan yang mesti bayarkan.

2.3 Hasil Perhitungan Pajak Penghasilam Pasal 21 Gaji Karyawan Tetap pada CV Surya Teknik Gemilang Banjarmasin

Seorang karyawan tetap bernama Rina Nur Astuti yang bekerja di CV.STG. Gaji pokok bulanan Rp 3.500.000. Dia sudah menikah serta tidak memiliki tanggungan. Perhitungan PPh Pasal 21 atas income dari riwayat hidup Rina Nur Astuti. STG adalah

gaji sebulan		Rp 3.500.000
pengurangan		
b. jabatan (5% x Rp 3.500.000)		Rp 175.000
Jumlah peng. neto 1 bln		Rp 3.325.000
Jumlah peng. neto 1 tahun		Rp 39.900.000
PTKP (TK/0)		
WP Sendiri	Rp 54.000.000	
TOTAL PTKP		Rp 54.000.000
PKP		Rp 14.100.000
PPh pasal 21 terutang 1 tahun	Rp 705.000	
PPh pasal 21 terutang 1 bln	Rp 58.750	

Tabel 2.2

Daftar Perincian Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh Perusahan

No	Nama	NPWP	Jabatan	Status	Gaji Pokok	Biaya Jabatan	Penghasilan Neto		PTKP	PKP	PPh Terutang	
							Sebulan	Setahun			Sebulan	Setahun
1	Apik Iskandar	00.000.000.0-731.000	Manager	K/3	Rp8.000.000	Rp 400.000	Rp7.600.000	Rp 91.200.000	Rp 72.000.000	Rp 19.200.000	Rp 80.000	Rp 960.000
2	Ahmad Faysal	00.000.000.0-731.000	Marketing	K/1	Rp7.000.000	Rp 350.000	Rp6.650.000	Rp 79.800.000	Rp 63.000.000	Rp 16.800.000	Rp 70.000	Rp 840.000
3	Mira Erliana	00.000.000.0-731.000	Accounting	TK/0	Rp6.550.000	Rp 327.500	Rp6.222.500	Rp 74.670.000	Rp 54.000.000	Rp 20.670.000	Rp 86.125	Rp 1.033.500
4	Syamsul Arifin	00.000.000.0-731.000	Logistik/Transport	K/1	Rp6.400.000	Rp 320.000	Rp6.080.000	Rp 72.960.000	Rp 63.000.000	Rp 9.960.000	Rp 41.500	Rp 498.000
5	Hadriani	00.000.000.0-731.000	Transport/Gudang	K/0	Rp5.500.000	Rp 275.000	Rp5.225.000	Rp 62.700.000	Rp 58.500.000	Rp 4.200.000	Rp 17.500	Rp 210.000
6	Heru Wardana	00.000.000.0-731.000	Transport/Gudang	K/2	Rp5.500.000	Rp 275.000	Rp5.225.000	Rp 62.700.000	Rp 67.500.000	Rp 4.800.000	Rp 20.000	Rp 240.000
7	Rina Nur Astuti	Tidak Ber NPWP	Administrasi	TK/0	Rp3.500.000	Rp 175.000	Rp3.325.000	Rp 39.900.000	Rp 54.000.000	Rp 14.100.000	Rp 58.750	Rp 705.000
Jumlah					Rp42.450.000		Rp40.327.500	Rp483.930.000		Rp89.730.000	Rp373.875	Rp4.486.500

Sumber: CV Surya Teknik Gemilang (data diolah kembali oleh peneliti)

Perincian Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peneliti menurut UU Perpajakan

gaji sebulan		Rp 3.500.000
pengurangan		
b. jabatan (5% x Rp 3.500.000)		Rp 175.000
jumlah peng. neto 1 bln		Rp 3.325.000
jumlah peng. neto 1 thn		Rp 39.900.000
PTKP (TK/0)		
WP Sendiri	Rp 54.000.000	
TOTAL PTKP		Rp 54.000.000
PKP		Rp 14.100.000
PPh pasal 21 terutang 1 thn	Rp 705.000	
PPh pasal 21 terutang 1 bln	Rp 70.500	

Tabel 2.3

Daftar Perincian Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peneliti menurut UU Perpajakan

No	Nama	NPWP	Jabatan	Status	Gaji Pokok	Biaya Jabatan	Penghasilan Neto		PTKP	PKP	PPh Terutang	
							Sebulan	Setahun			Sebulan	Setahun
1	Apik Iskandar	00.000.000.0-731.000	Manager	K/3	Rp8.000.000	Rp 400.000	Rp7.600.000	Rp 91.200.000	Rp 72.000.000	Rp 19.200.000	Rp 80.000	Rp 960.000
2	Ahmad Faysal	00.000.000.0-731.000	Marketing	K/1	Rp7.000.000	Rp 350.000	Rp6.650.000	Rp 79.800.000	Rp 63.000.000	Rp 16.800.000	Rp 70.000	Rp 840.000
3	Mira Erliana	00.000.000.0-731.000	Accounting	TK/0	Rp6.550.000	Rp 327.500	Rp6.222.500	Rp 74.670.000	Rp 54.000.000	Rp 20.670.000	Rp 86.125	Rp 1.033.500
4	Syamsul Arifin	00.000.000.0-731.000	Logistik/Transport	K/1	Rp6.400.000	Rp 320.000	Rp6.080.000	Rp 72.960.000	Rp 63.000.000	Rp 9.960.000	Rp 41.500	Rp 498.000
5	Hadriani	00.000.000.0-731.000	Transport/Gudang	K/0	Rp5.500.000	Rp 275.000	Rp5.225.000	Rp 62.700.000	Rp 58.500.000	Rp 4.200.000	Rp 17.500	Rp 210.000
6	Heru Wardana	00.000.000.0-731.000	Transport/Gudang	K/2	Rp5.500.000	Rp 275.000	Rp5.225.000	Rp 62.700.000	Rp 67.500.000	Rp 4.800.000	Rp 20.000	Rp 240.000
7	Rina Nur Astuti	Tidak Ber NPWP	Administrasi	TK/0	Rp3.500.000	Rp 175.000	Rp3.325.000	Rp 39.900.000	Rp 54.000.000	Rp 14.100.000	Rp 70.500	Rp 705.000
Jumlah					Rp42.450.000		Rp40.327.500	Rp483.930.000		Rp89.730.000	Rp385.625	Rp4.486.500

Perpajakan

Sumber: CV Surya Teknik Gemilang (data diolah kembali oleh peneliti)

Dengan adanya pendefinisian ditas, bahwa ditemukan selisih jumlah pajak yang terutang. Menurut CV Surya Teknik Gemilang pajak yang harus dibayar sebesar Rp 58.750, namun Ketentuan DJP Nomor: PER-16/PJ/2016 pajak yang harus dibayar sebesar Rp 70.500. Apabila terdapat kurang bayar dan kekurangan, maka SPT PPh dapat diubah untuk itu dan kekurangan tersebut diselesaikan dan dilunasi ke Bendahara.

2.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sistem Online

CV Surya Teknik Gemilang setiap bulan akan melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 yang dibayarkan pada karyawan serta membayar dan menyetorkan selaras dengan Ketentuan Menteri Keuangan No. 40/PMK.03/2017. Setelah pembayaran/penyetoran ke Kementerian Keuangan, CV Surya Teknik Gemilang akan melaporkan secara online. Pasal 21 Laporan SPT berkala Pph disampaikan berbentuk berkas file CSV yang disampaikan oleh Wajib Pajak Badan melalui USB stick atau CD. Menurut Pasal 8(6) PMK09/PMK.03/2018. Pengantaran berkas tidak lagi diantarkan secara langsung kekantor.

Berkas yang sudah di isi secara digital wajib dikirimkan oleh wajib pajak badan melalui metode email yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018, harus melaporkan PPh Pasal 21 melalui sistem online. Untuk pelaporan berkala berdasarkan SPT Pph Pasal 21, Perusahaan akan melaporkan dengan baik pada batas waktu yang telah dipastikan, yaitu 20 bulan setelah berakhirnya masa pajak.

KESIMPULAN

Setelah menerapkan mekanisme perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dari gaji pekerja tetap, CV Surya Teknik Gemilang dapat menyimpulkan bahwa penghitungan serta pemotongan PPh Pasal 21 dari PPh pekerja telah benar dilakukan oleh perusahaan, namun tetap terdapat selisih jumlah pajak yang dibayarkan. Menurut CV Surya Teknik Gemilang, pajak yang harus dibayar adalah Rp 58.750, namun menurut perhitungan kebijakan DJP, UU No: PER-16/PJ /2016, pajak yang mesti dibayar ialah Rp 70.500. Pasalnya, perseroan menghitung PPh atas nama Rina Nur Astuti agar tidak mengenakan tarif pajak tinggi 20% kepada wajib pajak tanpa NPWP. SPT PPh dapat diubah sehingga terdapat kurang bayar dan kurang bayar tersebut, dan kekurangannya dapat dilunasi dan dilunasi ke Bendahara.

Berlandaskan penjabaran dan uraian diatas untuk itu peneliti mengajukan saran kepada CV Surya Teknik Gemilang Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 21, WP OP harus semakin memperkuat kepatuhan dalam pelaksanaan pemotongan, penghitungana, dan pelaporan yang benar dan akurat berdasarkan Pasal 21 PPh, dan memberikan kepada setiap karyawan surat keterangan pajak yang dipotong secara bulanan dan tahunan.

Sehubungan dengan peningkatan pemahaman dan kepatuhan di bidang perpajakan, perlu adanya salah satu staff ahli perpajakan di dalam perusahaan agar CV Surya Teknik Gemilang

Banjarmasin tetap bisa terus Berpartisipasi aktif dalam interaksi yang disponsori KPP untuk memastikan penghitungan melaporkan SPT PPh Pasal 21 sesuai atas ketentuan undang-undang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasia D.dan L. Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia. Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis.* Andi. Yogyakarta.

Arifin Zainal. (2014) *Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bagus Perkasa Lumajang.*

Fadillah, Muhammad Syarif. (2011). *Laporan Tugas Akhir. Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. D3 Pajak. (2022). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma Tiga (3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.*

Halim, Abdul. (2020). *Perpajakan, Konsep, Aplikasi, contoh dan studi kasus,* Jakarta: Salemba Empat

Haryanti, Septy Rafellia. (2022). *Evaluasi Sistem Pemotongan, Penyetoran, Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.*

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.

Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*

(Republik Indonesia). Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 *Tentang besarnya PTKP.*

Siahaan, Pahala Marihot. 2010. *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu